

Soal Data Kematian, Anies: Kami Menggunakan Ilmu Pengetahuan

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, pihaknya tidak pernah mengurangi ataupun mengubah data kematian akibat Covid-19. Sejangka ini, diketahui sudah 12.908 orang meninggal akibat Covid-19 di Ibu Kota.

“Terkait kematian, Kami di DKI Jakarta tidak pernah mengurangi atau mengubah data-data. Kematian selama pandemi selalu dilaporkan apa adanya,” kata Anies dalam keterangan unggahan Instagram resminya, Jumat (13/8).

Pemprov DKI, kata dia, selalu melaporkan data kematian sesuai kriteria dari Kementerian Kesehatan dan data kematian Covid-19 berdasarkan protokol pemakaman Covid-19. Sebab, menurut WHO, semua data kematian perlu dicatat dan dilaporkan.

Upaya pencatatan dan pelaporan data itu, lanjut Anies, bahkan telah dilakukan pihaknya sejak awal pandemi. Padahal, ketika itu kewenangan Pemprov DKI masih terbatas dan juga terbatasnya

jumlah tes Covid-19.

“Untuk mendeteksi adanya wabah (saat awal pandemi), kami menggunakan data pelayanan pemakaman agar bisa mendeteksi bahwa wabah telah masuk dari luar negeri ke Ibu Kota,” ungkap Anies.

Anies menambahkan, prinsip Pemprov DKI Jakarta dalam menangani semua masalah, termasuk Covid-19, adalah menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan data yang benar dan akurat, serta transparansi data.

Data kematian akibat Covid-19 menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Musababnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut akan menghapus angka kematian dalam indikator penanganan Covid-19.

Alasan Luhut karena terjadi masalah dalam input data yang disebabkan akumulasi dari kasus kematian di beberapa pekan sebelumnya. Rencana Luhut ini lantas dikritik banyak pihak, terutama para epidemiolog. ■ yan

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



STIKER PENDATAAN VAKSINASI COVID-19

Pengurus RW menuliskan data warga yang sudah dan belum divaksin di stiker vaksin sebelum ditempelkan di rumah warga di lingkungan RW 07, Kebayoran Lama Utara, Jakarta, Jumat (13/8). Pemasangan stiker vaksin yang digagas oleh Ketua RW tersebut untuk mendata seluruh warga yang sudah dan belum divaksinasi COVID-19 beserta alasannya agar warga yang belum divaksin bisa mengikuti vaksinasi.

GANJIL GENAP DIANGGAP RISKAN

Pengamat Usulkan Jakarta Kembali ke Sistem Penyekatan

Sejak ganjil-genap kembali berlaku untuk menggantikan sistem penyekatan, mobilitas warga terpantau melonjak. Kami merekomendasikan agar tidak lagi menggunakan ganjil-genap untuk mengendalikan mobilitas warga pada masa pandemi Covid-19, kata Pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan.

JAKARTA (IM) - Pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan mengusulkan agar pembatasan pergerakan warga ke DKI Jakarta kembali pada sistem penyekatan, yang ia nilai lebih efektif. “Sistem penyekatan mampu membatasi mobilitas warga hingga 100 persen dan mengendalikan

perjumpaan langsung warga, kerumunan, juga operasi ilegal perkantoran yang tidak sesuai aturan PPKM Level 4,” jelas Tigor dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (13/8).

“Kami merekomendasikan agar tidak lagi menggunakan ganjil-genap untuk meng-

endalikan mobilitas warga pada masa pandemi Covid-19,” lanjutnya.

Saat ini, penalaran Covid-19 di Ibu Kota menunjukkan tren perbaikan signifikan setelah melalui gelombang kedua pada Juli 2021 yang sangat kelam. Masalahnya, menurut Tigor, sejak ganjil-genap kembali berlaku untuk menggantikan sistem penyekatan, mobilitas warga terpantau melonjak. “Terlihat hari pertama penerapan ganjil-genap masa pandemi di Jakarta mengakibatkan kenaikan atau kepadatan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta,” ujarnya.

Kondisi ini dinilai riskan dan berbahaya, karena membuka ruang perjumpaan langsung warga serta paparan Covid-19, dan dikhawatirkan

membuat upaya keras untuk menurunkan penularan virus corona di Ibukota jadi sia-sia.

“Saatnya kita bersikap profesional dalam menangani pandemi Covid-19 ini agar warga terlindungi dari bahaya Covid-19. Sudah terlalu lama, hampir 2 tahun kita terkurung dalam pandemi Covid-19,” ungkap Tigor.

“Kami merekomendasikan agar Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta kembali menggunakan penerapan sistem penyekatan di 100 titik serta pengawasan penerapan PPKM Level 4 secara konsisten dan tegas,” pungkasnya.

Gencarkan Sosialisasi Aturan Ganjil-Genap

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengencangkan so-

sialisasi kebijakan pengaturan kendaraan roda empat berdasarkan pelat nomor ganjil-genap di sejumlah ruas jalan Ibu Kota.

“Kami mohon maaf atas aturan ganjil-genap, jika mungkin kurang sosialisasi. Karena itu, akan kami terus lakukan baik itu di media sosial atau Dishub,” kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria saat ditemui di Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (13/8).

Riza mengatakan, hal itu dilakukan karena berdasarkan evaluasi penerapan ganjil-genap yang dimulai 12 Agustus 2021, masih banyak pengemudi roda empat yang belum mengetahui aturan tersebut. Dia juga memaklumi apabila masih ada pengemudi mobil yang tidak tahu pemberlakuan kembali aturan ganjil-genap.

Mungkin kemarin (12/8) hari pertama banyak belum tahu,” ujar Riza. Hanya saja, ia tidak menyinggung apakah mereka yang tidak tahu termasuk anggota Fraksi PSI DPRD DKI, Viani Limardi, yang sempat berdebat dengan polisi dan mengaku tidak tahu penerapan ganjil-genap.

Riza melanjutkan, seluruh kebijakan yang diambil Pemprov DKI, termasuk pemberlakuan kembali ganjil-genap bertujuan baik untuk masyarakat. “Pada intinya semua kebijakan yang diambil oleh Pemprov untuk membantu masyarakat agar semua dapat berjalan dengan baik,” tutur Riza.

Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan aturan pelat nomor ganjil-genap di sejumlah ruas utama jalan Ibu Kota. Di antaranya, Jalan Sudirman, Thamrin, Medan Merdeka Barat, Majapahit, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Pintu Besar Selatan dan Gatot Subroto.

Kebijakan itu berlaku mulai 12-16 Agustus 2021 dan dilakukan menyusul dibukanya 100 titik penyekatan di Jadetabek oleh Polda Metro Jaya dan sebagai penggantinya dilaksanakan kebijakan pembatasan kendaraan dengan sistem pelat nomor ganjil-genap untuk mengurangi mobilitas warga. ■ yan



FOTO : MADONG LUBIS

PROYEK TANPA PAPAN NAMA

Meskipun sudah berlangsung sejak sepuluh hari yang lalu, kegiatan pembuatan turap Taman Kota Bekasi, Kayuringin, Bekasi Selatan ini belum dipasang papan proyek. Di Kota Bekasi, kegiatan yang dibiayai dengan uang negara nampaknya berjalan mulus-mulus saja meskipun tanpa papan proyek sebagai informasi untuk masyarakat. Foto diambil, Jum'at (13/8) oleh Madong Lubis.

Langgar Aturan PPKM, Kantor Konveksi di Setiabudi Disegel

JAKARTA (IM) - Polda Metro Jaya bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Satpol PP DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) perkantoran nonesensial yang tetap membuka usaha di kawasan Karet Pedurenan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (13/8). Satu kantor konveksi disegel karena melanggar aturan PPKM level 4.

Satu perkantoran nonesensial dilakukan pengegelan karena tetap mempekerjakan karyawannya di kantor.

Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker, Larna Widodo mengatakan, kantor konveksi tersebut disegel karena melanggar aturan dengan memberlakukan 20 pegawai kerja di kantor. Seharusnya berdasarkan aturan PPKM, perusahaan non esensial harus memberlakukan WFH 100

persen. “Karena termasuk nonesensial dan seharusnya tidak bekerja kita lakukan penutupan sampai tanggal 16,” kata Lerna Widodo, Jumat (13/8).

Lebih lanjut dia mengatakan, perusahaan konveksi yang disegel itu merupakan pemasok di mal. Perusahaan tersebut memberikan alasan bahwa 20 orang pegawai tersebut hanya untuk pengambilan. Meski begitu pihaknya akan tetap meneygel kantor tersebut.

“Perusahaannya juga sebagai pendukung di mal. Masuk ke kantor untuk mengambil data dan dokumen untuk dibawa ke mal kita kasih waktu sampai jam 12 saja. Karyawan yang masuk ada 20 orang dari 180 orang dan kita lakukan pengegelan setelah pengambilan data selesai,” tuturnya. ■ yan

Pj. Bupati Bekasi Hadiri Panen Perdana Bawang Merah di Desa Sukahurip

FOTO : DOK.PIM, PROKOPIM SETDA KABUPATEN BEKASI



Pj. Bupati Bekasi, Jawa Barat, Dani Ramdan (tengah) saat kunjungan kerja sekaligus panen bawang merah perdana bersama Kelompok Tani Sumber Hurip di Desa Sukahurip, Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (12/8).

SUKATANI (IM) - Pj. Bupati Bekasi, Jawa Barat, Dani Ramdan bersama Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi melakukan kunjungan kerja sekaligus panen bawang merah bersama kelompok Tani Sumber Hurip, yang berlokasi di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, pada Kamis (12/8).

Pj. Bupati Bekasi saat diwawancara secara terpisah menyampaikan, bahwa ini adalah kali pertama para petani

di Desa Sukahurip menanam bawang merah dengan menggunakan bibit benih yang diambil langsung dari Brebes.

“Hari ini saya ikut melakukan panen bawang merah bersama para petani. Sebelumnya, para petani di sini hanya menanam cabe, ketumut, kemangi. Ini baru pertama kalinya panen bawang merah dengan benih dari Brebes, dan hasilnya lebih bagus dan besar-besar,” ujarnya dalam rilis Prokopim

Setda Kabupaten Bekasi, Kamis (12/8) malam.

Dani menyampaikan, Dinas Pertanian akan berinisiasi dengan para penyuluh pertanian untuk menyebarluaskan tanaman bawang merah ke beberapa Desa yang ada di Kabupaten Bekasi.

Dirinya menegaskan Pemerintah Kabupaten Bekasi akan senantiasa mendukung program tersebut untuk dapat memulihkan perekonomian

petani di Desa Sukahurip.

“Nantinya Dinas Pertanian akan berinisiasi dengan para penyuluh untuk tidak sebarluaskan, dan kalau memang lebih menguntungkan untuk para petani akan kita dukung sepenuhnya supaya pemulihan ekonomi dan kesejahteraan para petani ini pasca pandemi menjadi lebih baik,” jelasnya.

Tidak hanya itu, terkait pemasarannya Pj. Bupati Bekasi menjelaskan jika kuantitas dan kualitas bawang merah ini belum sesuai untuk menjadi komoditi ekspor. Maka tanaman bawang merah ini baru dapat mencukupi di pasar domestik saja.

“Kalau untuk diekspor kuantitasnya harus banyak, seperti di daerah Brebes sudah puluhan hektar baru bisa. Paling tidak ini bisa masuk ke dalam pasar domestik, karena masih bisa diserap dengan harga yang masih normal,” tambah dia.

Diketahui, hasil panen bawang merah perdana ini mencapai 11,13 ton per hektar. Hasil panen ini dilakukan di tanah seluas 2 hektar yang merupakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi dan swadaya dari masyarakat sekitar. ■ mdl

Kebijakan itu berlaku mulai 12-16 Agustus 2021 dan dilakukan menyusul dibukanya 100 titik penyekatan di Jadetabek oleh Polda Metro Jaya dan sebagai penggantinya dilaksanakan kebijakan pembatasan kendaraan dengan sistem pelat nomor ganjil-genap untuk mengurangi mobilitas warga. ■ yan

APPBI Berharap Mal di Kota Bekasi Beroperasi pada 17 Agustus

BEKASI (IM) - Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Djaelani menyatakan, 80 hingga 90 persen karyawan gerai di pusat perbelanjaan di Kota Bekasi telah melaksanakan vaksinasi. Dengan capaian vaksinasi untuk karyawan gerai yang sudah cukup tinggi, Djaelani berharap mal di Kota Bekasi dapat beroperasi bulan ini.

“Kami sih berharap tanggal 17 (Agustus) sudah bisa buka, dari teman-teman (pengusaha) berharap buka,” ujar Djaelani ketika dikonfirmasi Jumat (13/8).

Meski begitu, Djaelani berharap bahwa manajemen mal harus bisa mengantisipasi kemungkinan terjadinya euforia masyarakat saat pem-

bukaan mal setelah 17 Agustus nanti. Karena itu, Djaelani berpesan agar pengelola mal melakukan pemeriksaan ketat terhadap calon pengunjung sesuai aturan PPKM level 4, yakni menunjukkan sertifikat vaksin.

“Yang dikhawatirkan euforianya tinggi pasca-17 Agustus, mungkin bisa-bisa saja kalau warga yang datang ke mal itu juga sudah disiplin, tentunya dengan disiplin ini tadilah persyaratannya yang sudah divaksin jadi kondisinya aman,” ujarnya.

“Orang yang masuk mal harus sudah divaksin, jadi buat antisipasinya tidak terpapar lagi dari yang di mal. Selama ini yang terpapar di mal sih enggak ada ya,” imbuh dia. ■ yan

TP-PKK Kabupaten Bekasi Berikan Pembekalan Tracer Covid-19

FOTO : DOK.PIM, PROKOPIM SETDA KABUPATEN BEKASI



Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bekasi.

CIKARANG PUSAT (IM) - Guna meningkatkan peranan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bekasi di tengah masyarakat,

TP-PKK memberikan pembekalan tracer Covid-19 yang diadakan secara terpusat, di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Jumat (13/8).

Pj. Ketua TP-PKK Ka-

bupaten Bekasi, Ny. Hj. Ria Dani Ramdan, dalam kesempatan tersebut meminta peranan aktif PKK di tengah masyarakat, terlebih di masa pandemi. Menurutnya, ada

tiga peranan penting penggerak PKK, yakni sebagai pusat informasi, pusat edukasi, dan pusat penggerak.

“Ada tiga pusat dalam organisasi PKK. Sebagai pusat informasi, kita harus update terus mengenai informasi karena kita sebagai garda terdepan masyarakat. Sebagai pusat edukasi, (kita juga) mengambil banyak peran. Jika informasi dan edukasi kurang, kita tidak bisa menyampaikan apa-apa. Selanjutnya juga sebagai pusat penggerak, dari informasi dan edukasi yang kita peroleh,” terangnya.

Dirinya juga mengatakan, potensi yang dimiliki oleh setiap penggerak PKK harus terus dikembangkan, terutama sebagai penggerak dan motivator bagi masyarakat.

“Perempuan sebagai srikandi ini harus kuat, terus ber-

juang dan terus hebat. Potensi yang harus terus kita gali dan kita kembangkan bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi, Ida Farida, mengungkapkan bahwa PKK dapat mengambil peran di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda Kabupaten Bekasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki dari tiap kader, baik yang ada di kecamatan sampai dengan desa.

“Perannya ini sangat besar. Apalagi di tengah pandemi. PKK harus bisa mengambil peran, karena masalah pandemi ini tidak bisa diselesaikan secara perorangan,” terangnya dalam rilis Prokopim Setda Kabupaten Bekasi, Jumat (13/8). ■ mdl